

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi. Menata sektor perbankan adalah salah satu cara mengembalikan stabilitas ekonomi ketika sektor ekonomi mengalami penurunan. "Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai sarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian" (Y. Sri Susilo et al. (2000: 7). Peningkatan peranan perbankan sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan volume usaha sektor riil. Oleh karenanya kekacauan sistem perbankan akan berdampak luas pada perekonomian negara.

Salah satu langkah nyata pemerintah untuk mendorong kegiatan perbankan dalam sektor perekonomian nasional adalah dengan cara menurunkan suku bunga Surat Berharga Indonesia (SBI). Seperti yang dikemukakan oleh Purbaya Yudhi Sadewa (2006: 1) bahwa:

Prospek inflasi yang makin terkendali memberikan ruang bagi BI untuk menurunkan suku bunga ke level yang lebih rendah lagi. Akhir tahun ini suku bunga SBI diperkirakan akan turun ke sekitar 9,75%. Dengan tetap terkendalinya laju inflasi pada 2007, suku bunga SBI diperkirakan mengalami penurunan terus sampai di bawah 8% pada akhir 2007. Turunnya suku bunga SBI akan diikuti oleh penurunan suku bunga yang lain, termasuk suku bunga pinjaman.

Hal ini dimaksudkan agar suku bunga kredit ikut turun sehingga perbankan dapat melakukan pemberian kredit terutama pada sektor riil. Menurut Y. Sri Susilo *et al* (2000 : 7) peranan dunia perbankan adalah sebagai berikut "Perbankan merupakan

lembaga perantara yaitu lembaga yang mempertemukan unit surplus (penabung) dan unit defisit (peminjam)“. Hal ini sejalan dengan yang diutarakan oleh Dudy Roesmara (2005: 1) bahwa: “Peningkatan peranan perbankan sangat diperlukan untuk meningkatkan volume usaha sektor riil yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat“.

Tabel 1.1
Kinerja Perbankan 2002 – September 2005

INDIKATOR	2002	2003	2004	Mar '05	Jun '05	Sept '05
Total Aset	1,112.2	1,213.5	1,272.1	1,280.6	1,344.6	1,418.6
Growth (y-o-,%)	1.14	9.11	4.83	11.36	13.40	16.94
Kredit	371.06	440.51	559.47	582.51	629.06	680.06
Growth (y-o-,%)	17.40	18.72	27.01	26.74	28.02	31.15
Dana Pihak Ketiga	835.78	888.57	963.11	959.25	1,011.00	1,077.54
Growth (y-o-,%)	4.82	6.32	8.39	9.61	10.76	16.31
Modal	103.60	112.40	130.17	152.59	144.50	156.46
Laba Sebelum Pajak	21.91	28.85	41.09	11.05	15.77	24.82
NIM (%)	4.14	4.64	5.88	5.81	5.75	5.65
LDR (%)	38.24	43.52	49.95	51.22	53.08	54.16
NPL Gross (%)	7.50	6.78	4.50	4.37	6.99	7.87
BOPO (%)	97.46	88.10	76.64	81.19	88.79	90.05
CAR (%)	22.44	19.42	19.42	21.75	19.51	19.43
ROA (%)	1.96	2.63	3.46	3.41	2.20	1.97

Sumber: BI, Statistik Perbankan Indonesia

Dapat dilihat berdasarkan tabel tersebut bahwa pada tahun 2002 hingga tahun 2004 kinerja sektor perbankan menunjukkan keadaan yang terus membaik, yang tercermin antara lain dari meningkatnya pertumbuhan dana dan kredit

perbankan, meningkatnya *loan to deposit ratio* (LDR), menurunnya *Noan Performing Loan* (NPL) serta meningkatnya *profitabilitas*. Namun, pada pertengahan tahun 2005 tekanan yang terjadi pada stabilitas ekonomi makro telah membawa pengaruh negatif pada perkembangan kinerja sektor perbankan. Walaupun jumlah kredit yang disalurkan dan LDR meningkat beberapa indikator kinerja perbankan mulai menunjukkan perkembangan yang kurang mengembirakan, yang tercermin antara lain dari meningkatnya kembali NPL, menurunnya NIM (*net interest margin*), menurunnya profitabilitas, menurunnya CAR, serta meningkatnya rasio biaya terhadap pendapatan (BOPO).

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga. (Suhardjono, 2003: 16)

Pendapatan terbesar bank adalah berasal dari kredit. "Dalam neraca bank sebagian besar asset bank berupa kredit, begitu juga halnya dengan pendapatan bank sebagian besar berasal dari pendapatan bunga kredit." (Suhardjono, 2003: 16)

Kelangsungan hidup sebuah bank sangat ditentukan oleh kualitas kredit karena itu berbagai regulasi di bidang perkreditan diterbitkan oleh pemerintah, Bank Indonesia, maupun oleh pihak internal bank dengan tujuan untuk meminimalkan resiko kredit agar kelancaran usaha bank tidak terganggu. Berbagai regulasi tersebut antara lain, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 mengenai bagaimana seharusnya kredit diberikan, kemudian dalam Rancangan UU tentang Perkreditan Perbankan (draft 7

Maret 2001) juga ditetapkan kewajiban bank untuk membuat pedoman prosedur pemberian kredit secara tertulis, Bank Indonesia mengatur dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 mengenai kewajiban bank umum untuk membuat pedoman perkreditan secara tertulis agar dapat dipergunakan oleh seluruh pejabat yang terkait dengan perkreditan, draft peraturan Bank Indonesia tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Perbankan Indonesia (konsep tahun 2002) juga mewajibkan setiap bank untuk menyusun kebijakan, pedoman, dan strategi manajemen resiko secara tertulis, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) ditentukan oleh BI dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/177/KPR/DIR tanggal 31 Desember 1999 untuk mengendalikan ekspansi kredit, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KPR/DIR tanggal 12 November 1998 mengatur bagaimana seharusnya penilaian kualitas kredit berdasarkan tingkat kolektibilitasnya dilakukan, serta bagaimana cadangan penghapusan kredit harus disisihkan oleh setiap bank dari setiap jenis kolektibilitas kreditnya.

Pada tahun 2006 penyerapan kredit menurun karena ekspansi kredit yang melambat, kondisi usaha yang makin lemah menyebabkan pihak bank harus berhati-hati dalam menyalurkan kredit agar tidak menjadi beban di kemudian hari. Seperti diberitakan dalam harian Kompas 28 April 2006 bahwa ekspansi usaha yang masih melambat di prediksi ikut menurunkan penyerapan kredit perbankan. Hal ini menunjukkan kredit yang disalurkan perbankan belum cukup menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi untuk kembali pada level sebelum krisis,

yang berarti bahwa fungsi intermediasi perbankan masih belum pulih atau terjadi disintermediasi perbankan.

Fungsi intermediasi adalah salah satu fungsi yang penting dalam perbankan. Untuk mendeteksi fungsi intermediasi dapat digunakan indikator keuangan *loan to deposit ratio* (LDR). LDR merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat. (Duddy Roesmara, 2005: 1)

PT. BRI,Tbk adalah bank milik pemerintah yang kegiatan operasional sehari-harinya tidak dapat dipisahkan dari pemberian kredit kepada nasabah. PT. BRI,Tbk melakukan ekspansi kredit ke berbagai sektor, baik sektor usaha kecil, menengah, atas, riil, dan sektor-sektor lainnya. Selain bertujuan meningkatkan kualitas, kuantitas dan pangsa pasar kredit yang di berikan PT. BRI,Tbk juga memberikan suntikan dana segar yang semakin di butuhkan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang terus meningkat setiap tahunnya hal ini terlihat dalam peningkatan LDR yang menggambarkan perbandingan besarnya jumlah kredit yang diberikan dengan dana dari masyarakat yang berhasil dihimpun oleh BRI. Dalam melaksanakan pemberian kredit PT. BRI berusaha untuk meningkatkan tingkat likuiditas melalui peningkatan jumlah dana yang di himpun dari masyarakat. Besarnya *loan to deposit ratio* (LDR) dan jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat dapat dilihat seperti yang digambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.2.

Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Deposit BRI 2001 –2005

(dalam triliun Rupiah)

Tahun	LDR	Deposit
2001	56,08%	57,758
2002	56,55%	69,627
2003	62,37%	76,316
2004	75,69%	82,400
2005	77,83%	97,046

Sumber: www.bri.co.id

Pemberian kredit perbankan masih rendah namun, sampai kuartalan 2006 BRI berhasil meningkatkan *outstanding* kreditnya. Pertumbuhan kredit dan LDR BRI melampaui rata-rata perbankan di Indonesia. Tidak diragukan lagi dengan ini BRI berhasil meningkatkan labanya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh humas BRI (2006) bahwa

Sampai dengan Kuartalan III/2006 BRI berhasil membukukan laba setelah pajak sebesar Rp3,10 triliun atau meningkat sebesar 23,56 % dibandingkan laba setelah pajak pada periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar Rp2,51 triliun... di tengah masih rendahnya pemberian kredit oleh perbankan di Indonesia, BRI berhasil meningkatkan *outstanding* kreditnya dari Rp72,46 triliun pada September 2005 menjadi sebesar Rp86,69 triliun atau naik 19,65 %. Sedangkan apabila dibandingkan dengan *outstanding* kredit pada Desember 2005 sebesar Rp75,53 triliun, pada posisi September 2006 terjadi kenaikan *outstanding* kredit sebesar 14,78%. Pertumbuhan kredit ini melampaui rata-rata perbankan di Indonesia yang hanya bertumbuh 4.58% dari Desember 2005 sampai dengan bulan Agustus 2006. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) BRI posisi Kuartalan III/2006 mencapai 77,29%, melampaui LDR perbankan nasional per bulan Agustus 2006 sebesar 61,26%

Dikarenakan keadaan makro ekonomi di Indonesia mulai membaik pertumbuhan kredit BRI tahun 2007 ditargetkan sebesar 20%. Seperti yang dapat dilihat dalam Suara Karya (2006: 1) bahwa BRI targetkan pertumbuhan kredit 20% tahun 2007 dengan alasan bahwa kondisi makro ekonomi semakin membaik, pertumbuhan kredit itu bila dinominalkan adalah sebesar Rp.16 triliun dan BRI optimis akan dapat direalisasikan karena BRI mulai memberikan pembiayaan bagi revitalisasi pertanian.

Seharusnya pemberian kredit merupakan pendapatan terbesar bank dan merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan dana yang dimiliki oleh bank. Namun, kenyataan yang ditemui berdasarkan survei pendahuluan pemberian kredit juga dapat menjadi penyebab terbesar kehancuran bank. Seperti yang terjadi pada Februari 2006, diberitakan dalam waspada online bahwa PT. BRI mengalami kendala pengembalian kredit dari mitranya.

Meski dianggap sukses menyalurkan kredit 2005, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk ternyata mengalami kendala pengembalian kredit dari mitranya. Tercatat, sekira 2,3 persen atau Rp70 miliar dari total pemberian kredit Rp2,3 triliun tahun lalu tersendat. (Waspada online,2006 : 1)

Untuk menjaga stabilitas moneter, perbankan harus berhati-hati dalam melakukan pemberian kredit. Jumlah kredit yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan bank. Kemampuan untuk memberikan kredit tergantung pada tingkat likuiditas, sebab likuiditas menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek karena memiliki alat pembayaran yang lebih besar dari utang jangka pendeknya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Komaruddin (2001: 34) bahwa “Secara umum, syarat likuiditas untuk permodalan menentukan bahwa modal yang diperlukan harus ditarik perusahaan

untuk jangka waktu yang sekurang-kurangnya sama dengan waktu modal itu di butuhkan “. Hal ini dapat di artikan bahwa suatu bank di katakan likuid apabila dapat memenuhi kewajiban penarikan uang dari penitip dana maupun dari para peminjam atau debitur. Suatu bank dengan tingkat likuiditas yang tinggi lebih berpotensi untuk melakukan pemberian kredit di banding bank dengan tingkat likuiditas yang lebih rendah.

Loan to deposit ratio (LDR) adalah rasio yang sangat umum digunakan sebagai indikator kerawanan dan mengukur kemampuan likuiditas suatu bank. Rasio ini umum digunakan karena kegiatan utama bank adalah pemberian kredit yang pendanaanya berasal dari masyarakat atau pihak ketiga lainnya. Semakin tinggi LDR maka semakin rendah tingkat likuiditas.

Loan to deposit ratio (LDR), yaitu indikator kemampuan perbankan dalam membayar semua dana masyarakat dan modal sendiri dengan mengandalkan kredit yang telah didistribusikan ke masyarakat. LDR dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara *total loan* dengan *total deposit* (*total loan* dibagi *total deposit*). (Anita Febryani dan Rahadian Zulfadin,2003: 21)

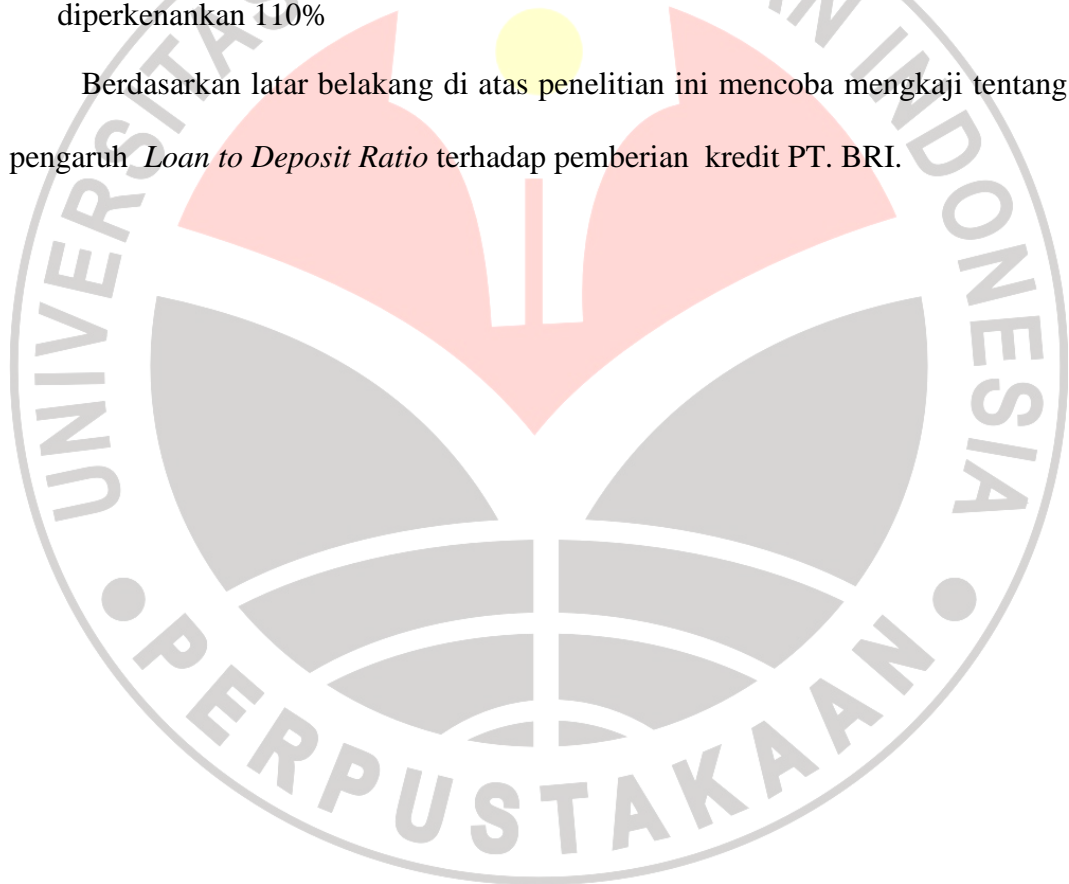
Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi penyaluran kredit dari bank, dengan resiko kredit macet yang juga semakin besar. Bila dicermati dengan seksama maka tingkat *loan to deposit ratio (LDR)* yang tinggi menunjukkan semakin rendahnya tingkat likuiditas suatu bank. Namun, tingkat LDR yang tinggi juga dapat menunjukkan bahwa pengelolaan dana yang telah dihimpun bank tersebut telah berhasil disalurkan dalam bentuk kredit.

Bank harus menjaga keseimbangan antara besar LDR dengan pemberian kredit yang akan diberikan oleh bank tersebut guna mengatasi adanya konflik kepentingan antara selalu tersedianya dana demi kemandirian nasabah dengan

penyaluran dana bank melalui pemberian kredit demi terjaminnya perolehan laba bagi bank tersebut. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Dahlan Siamat (2004: 71)

Untuk menghindari kerugian yang sangat besar, bank harus dapat mengelola dana yang telah berhasil dihimpun dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan, giro, dan deposito serta mampu menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit secara seimbang dengan memperhatikan likuiditasnya. Untuk menjaga keseimbangan tersebut, Bank Indonesia (BI) dalam rangka pelaksanaan pengaturan perbankan berdasarkan prinsip kehati-hatian menetapkan bahwa ketentuan *loan to deposit ratio* (LDR) maksimum diperkenankan 110%

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini mencoba mengkaji tentang pengaruh *Loan to Deposit Ratio* terhadap pemberian kredit PT. BRI.



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat perubahan jumlah pemberian kredit PT. BRI?
2. Bagaimana tingkat perubahan *loan to deposit ratio* (LDR) pada PT. BRI?
3. Bagaimana pengaruh antara tingkat perubahan *loan to deposit ratio* (LDR) PT. BRI terhadap perubahan jumlah pemberian kreditnya?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimana tingkat perubahan jumlah pemberian kredit PT. BRI, Tbk.
2. Untuk menganalisis bagaimana tingkat perubahan *loan to deposit ratio* (LDR) pada PT. BRI, Tbk.
3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh antara tingkat *loan to deposit ratio*(LDR) PT. BRI, Tbk terhadap perubahan jumlah pemberian kreditnya.

Kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah untuk :

1. Penulis, dapat menambah pengetahuan tentang pemberian kredit dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Bank yang bersangkutan, dapat memberikan masukan dalam berbagai kegiatan operasional sehari-hari berkaitan dengan pemberian kredit.
3. Pihak lain yang akan melakukan penelitian sejenis di harapkan dapat membantu sebagai salah satu rujukan penelitian.

1.4. Kerangka Pemikiran

Salah satu cara untuk mengoptimalkan dana yang dimiliki oleh bank adalah dengan melakukan pemberian kredit hal ini dikarenakan pendapatan terbesar bank adalah berasal dari kredit. Suhardjono (2003: 16) mengungkapkan dalam bukunya bahwa “Dalam neraca bank sebagian besar asset bank berupa kredit, begitu juga halnya dengan pendapatan bank sebagian besar berasal dari pendapatan bunga kredit.”

Kredit dapat di definisikan dengan empat cara yaitu kredit dianggap sebagai waktu yang diberikan untuk membayar barang/ jasa yang di jual atas kepercayaan, kredit merupakan penyediaan uang/ tagihan berdasarkan persepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga yang di tetapkan lebih dulu, kredit adalah kepercayaan yang diberikan berhubungan dengan kekayaan yang di serahkan atas janji pembayaran kelak, kredit adalah dana yang tersimpan dalam perkiraan bank. (Komaruddin, 2001: 5)

Hal ini sejalan dengan pengertian kredit yang disampaikan Suhardjono (2003: 16) dalam bukunya bahwa :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

Kegiatan perbankan di mulai dari adanya kepercayaan para nasabahnya serta keamanan uang nasabah. Bank akan semakin baik bila semakin besar jumlah penabungnya, hal ini mengindikasikan bahwa bank tersebut memiliki kepercayaan yang baik dari para nasabahnya. Sesuai dengan hukum *The law of the large numbers* yang berbunyi “... Apabila suatu lembaga keuangan mempunyai sejumlah besar penabung (*depositors*) maka kemungkinan terjadinya penarikan secara besar-besaran pada waktu bersamaan akan semakin kecil “ (Suad Husnan,

2001: 22). Itu sebabnya, bank dituntut selalu dalam keadaan siap membayar utangnya apabila sewaktu-waktu para deposan akan menarik dananya. Disisi lain bank sebagai suatu badan usaha yang bertujuan untuk memperoleh laba harus dapat mengelola dan memasarkan uangnya agar tidak ada kelebihan dana yang menganggur.

Banyak lembaga keuangan bank maupun bukan bank dalam menangani permintaan kredit dari masyarakat kurang memperhatikan atau tidak akurat dalam memprediksikan batas maksimum pemberian kredit yang dapat diberikan dan kemampuan melunasi atau membayar kembali debitur sehingga jumlah kredit yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan bank tersebut dalam melakukan pemberian kredit.

Kemampuan bank untuk melakukan pemberian kredit tergantung pada tingkat likuiditas, sebab likuiditas menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek karena memiliki alat pembayaran yang lebih besar daripada utang jangka pendeknya. Suatu bank dengan tingkat likuiditas yang tinggi lebih berpotensi melakukan pemberian kredit dibandingkan dengan bank yang tingkat likuiditasnya rendah.

Suatu bank dapat dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya terutama hutang-hutang jangka pendeknya. Dalam hal ini yang di maksud dengan hutang jangka pendek yang ada di bank antara lain adalah simpanan masyarakat seperti simpanan tabungan, giro, dan deposito. Dikatakan likuid jika pada saat ditagih bank mampu membayar. Kemudian bank juga harus dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak di biyai. (Kasmir, 2004: 28)

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio yang sangat umum digunakan sebagai indikator kerawanan dan mengukur kemampuan likuiditas suatu bank.

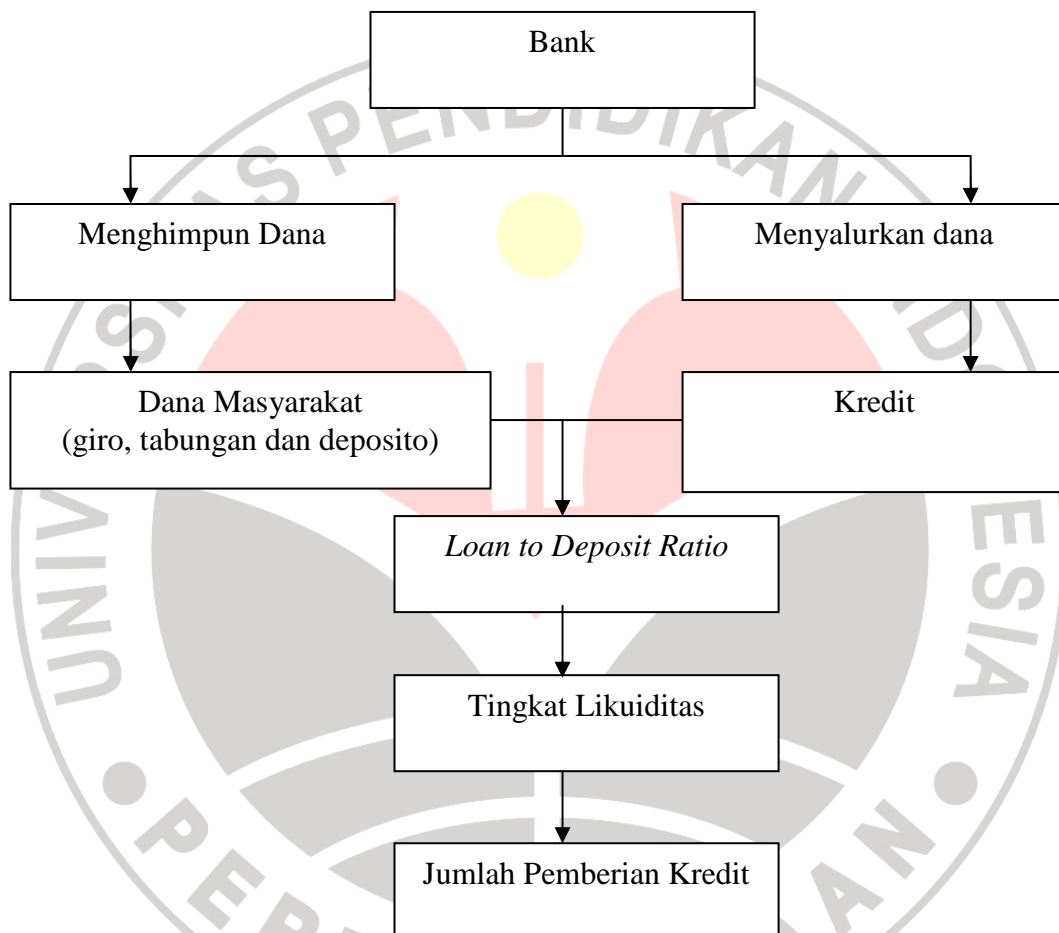
Seperti yang diutarakan oleh N. Lapoliwa dan Daniel S. (2000: 378) bahwa “*Loan to deposit ratio* merupakan rasio pertama dari rasio-rasio kunci yang menjadi sorotan utama dari para analis bank“. Rasio ini umum digunakan karena kegiatan utama bank adalah pemberian kredit yang pendanaannya berasal dari masyarakat atau pihak ketiga lainnya. Semakin tinggi LDR maka semakin rendah tingkat likuiditas.

Loan to deposit ratio (LDR), yaitu indikator kemampuan perbankan dalam membayar semua dana masyarakat dan modal sendiri dengan mengandalkan kredit yang telah didistribusikan ke masyarakat. LDR dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara *total loan* dengan *total deposit (Total Loan dibagi Total Deposit)*. (Anita Febryani dan Rahadian Zulfadin, 2003: 21)

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Dahlan Siamat (2004: 160) bahwa “*Loan to deposit ratio* memberikan indikasi mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit”

Oleh karena itu, *loan to deposit ratio* suatu bank harus tetap dalam keadaan seimbang tidak terlalu rendah namun juga tidak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia “...Bank Indonesia (BI) dalam rangka pelaksanaan pengaturan perbankan berdasarkan prinsip kehati-hatian menetapkan bahwa ...ketentuan *loan to deposit ratio (LDR)* maksimum 110%” (Dahlan Siamat, 2004: 71) hal ini dimaksudkan agar tingkat pengelolaan likuiditas bank benar-benar terjamin sehingga dapat melakukan kebijakan pemberian kredit untuk mengoptimalkan dana yang diperoleh bank namun dengan tingkat likuiditas yang tetap terjaga. Bila kestabilan dana likuid bank terjaga dengan baik maka kegiatan pemberian kredit dan operasional bank dapat berjalan lancar.

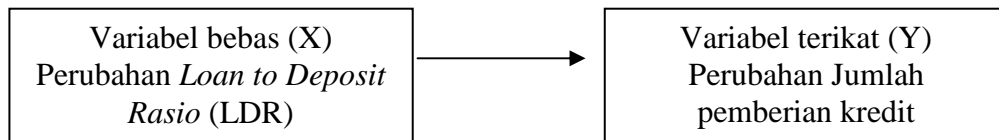
Berdasarkan pemikiran diatas, gambaran *Loan to deposit ratio* berpengaruh terhadap pemberian kredit bank dapat digambarkan secara skematis sebagai berikut :



Gambar 1.1.
Kerangka Pemikiran

Untuk menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti maka digunakan paradigma penelitian, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sugiyono (2002:5) bahwa "Paradigma penelitian adalah pola fikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti". Berdasarkan pengertian

paradigma penelitian tersebut maka paradigma penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

→ : mempunyai pengaruh terhadap

Gambar 1.2
Paradigma Penelitian

1.5 Asumsi dan Hipotesis

Asumsi

Asumsi merupakan anggapan dasar dalam menentukan jawaban atau permasalahan yang akan di hadapi untuk mengambil langkah yang tepat dalam sebuah penelitian. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Ruseffendi (2003: 22) “Sebelum hipotesis dirumuskan, biasanya kita menulis beberapa asumsi atau anggapan dasar...” Berdasarkan definisi asumsi di atas maka asumsi penelitian ini adalah: “ Diasumsikan faktor-faktor lain selain tingkat perubahan *Loan to deposit ratio*, seperti tingkat suku bunga, inflasi, dan kondisi perekonomian tidak memiliki pengaruh pada perubahan jumlah pemberian kredit”.

Hipotesis

Menurut Narbuko dan Achmadi (2004: 28) “Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu di buktikan kenyataannya“. Berdasarkan definisi hipotesis tersebut maka hipotesis dari penelitian ini adalah “Perubahan *Loan To Deposit Ratio* berpengaruh negatif terhadap perubahan jumlah pemberian kredit bank“.

